

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Pendelegasian kewenangan tentu disertai dengan penyerahan dan pengalihan pendanaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia yang terkait dalam kerangka desentralisasi fiskal. Akibat dari pendelegasian kewenangan dan penyerahan dana tersebut tentu adalah kebutuhan akan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Undang-Undang No 17 Tahun 2003 yaitu: “ Tentang Keuangan Negara yang mengatur pengelolaan keuangan daerah serta pertanggungjawabannya menyebutkan pertanggungjawaban tersebut meliputi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang komprehensif sebagai bentuk pertanggungjawabannya, yang tentunya harus diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)”.

Laporan keuangan pemerintah daerah bisa saja dijadikan sebagai wujud akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan PP No 71 Tahun 2010, informasi dalam laporan keuangan sesungguhnya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan akan informasi keuangan dari semua kalangan ataupun dalam hal ini kelompok pengguna seperti investor, masyarakat, dan pemerintah. Dengan ini berarti, laporan keuangan pemerintah daerah tentunya tidak dirancang untuk hanya memenuhi kebutuhan spesifik dari masing-masing kelompok pengguna. Walaupun

demikian, laporan keuangan pemerintah daerah dalam perannya sebagai wujud akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara, maka komponen laporan yang diinformasikan paling tidak mencakup jenis laporan atau elemen informasi yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan keuangan pemerintah daerah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Terdapat karakteristik laporan keuangan yang merupakan syarat yang diperlukan agar dapat memenuhi kualitas yang sesuai dengan ditentukan (PP No 71 Tahun 2010) yaitu: relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Dalam PP No 71 Tahun 2010 disebutkan bahwa kualitas laporan keuangan akan terpenuhi jika informasi dalam laporan keuangan tersebut relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. (Ni Luh Nyoman, Ari Udiyanti, Anantawikrama, Tungga Atmadja, Nyoman Ari Surya Darnawan, 2014).

Informasi yang terdapat dalam laporan keuangan bisa saja relevan, tetapi jika dalam penyajiannya tidak dapat diandalkan maka pengguna informasi tersebut bisa tidak akan mempercayai informasi yang disajikan tersebut. Beberapa hal seperti inilah yang akhirnya menyebabkan kualitas dari pelaporan keuangan menjadi sangat penting karena merupakan syarat karakteristik dari pelaporan keuangan agar dapat dikatakan memenuhi kualitas yang ditentukan perundang-undangan. Selain itu juga laporan keuangan daerah yang andal akan dapat dipercaya oleh penggunanya dalam kaitannya dengan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Proses pelaporan keuangan pemerintah daerah dilakukan dengan mengacu pada Standar

Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang sudah ditetapkan. Setelah disesuaikan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, selanjutnya laporan keuangan daerah harus diaudit dan dalam hal ini diaudit oleh BPK. Laporan keuangan diaudit untuk memeriksa salah satunya apakah laporan keuangan sudah disajikan sesuai dengan standar yang ditetapkan juga apakah laporan keuangan sudah memenuhi kriteria-kriteria yang ada seperti yang ditetapkan perundang-undangan yakni, laporan keuangan harus relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami.

Pelaporan keuangan pemerintah di Indonesia merupakan sesuatu hal yang menarik untuk dikaji, mengingat semakin menguatnya tuntutan akuntabilitas atas lembaga-lembaga publik, baik di pusat maupun daerah. Kenyataannya di dalam laporan keuangan pemerintah, masih banyak disajikan data yang tidak sesuai yang berhasil ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Untuk menegakkan akuntabilitas khususnya pada kinerja finansial di daerah, pemerintah daerah bertanggung jawab untuk mempublikasikan laporan keuangan kepada pemangku kepentingannya. Telah diketahui bahwa ada banyak pihak yang akan mengandalkan informasi dalam laporan keuangan untuk dipublikasikan oleh pemerintah daerah sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Oleh karena itu, informasi tersebut harus bermanfaat bagi para pemakai. Sebagai wujud pertanggungjawaban tersebut, upaya yang dapat dilakukan adalah dengan menyampaikan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Upaya yang nyata untuk mewujudkan transparansi dan

akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah adalah dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Ada banyak pihak yang mengandalkan informasi keuangan yang disajikan dan dipublikasikan oleh pemerintah daerah dengan kegunaan berbeda-beda, sehingga laporan yang disajikan tersebut harus berkualitas. Laporan keuangan dikatakan berkualitas jika laporan keuangan yang disajikan tersebut memenuhi syarat normatif yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Pengguna laporan keuangan berasal dari berbagai pihak dengan kepentingan yang berbeda-beda. Pengguna laporan keuangan pemerintahan antara lain (PP 71 Tahun 2010): masyarakat, wakil rakyat, lembaga pengawas, lembaga pemeriksa, pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi dan pinjaman, serta pemerintah. Kegunaan atau kebermanfaatan dapat ditentukan secara kualitatif. Dalam PP No. 71 Tahun 2010 diungkapkan bahwa, karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Karakteristik kualitatif yang merupakan prasyarat normatif antara lain:

1. Relevan,
2. Andal,
3. Dapat dibandingkan,
4. Dapat dipahami.

Untuk dapat memenuhi karakteristik kualitatif tersebut, maka pengelolaan keuangan di pemerintah daerah tidak terlepas dari peran pegawai yang mengelola dan melakukan pelaporan keuangan. Selain itu, dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi maka pekerjaan tersebut akan lebih mudah untuk dilaksanakan. Oleh karena itu, pegawai yang bekerja dalam pengelolaan keuangan harus memiliki kapasitas yang baik dalam mengelola keuangan pemerintah daerah dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi. Jika yang terjadi sebaliknya, maka pemanfaatan teknologi justru akan mempersulit pekerjaan pegawai.

Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 menyebutkan bahwa kualitas laporan keuangan akan terpenuhi jika informasi dalam laporan keuangan tersebut bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, dapat dikatakan andal juga jika informasi dalam laporan keuangan tersebut menyajikan setiap fakta secara jujur serta dapat diverifikasi. Informasi yang terdapat dalam laporan keuangan bisa saja relevan, tetapi jika dalam penyajiannya tidak dapat diandalkan maka pengguna informasi tersebut bisa saja tidak akan mempercayai informasi yang disajikan tersebut. Beberapa hal seperti inilah yang akhirnya menyebabkan kualitas dari laporan keuangan menjadi sangat penting karena merupakan syarat karakteristik dari pelaporan keuangan agar dapat dikatakan memenuhi kualitas yang ditentukan perundang-undangan. Selain itu juga laporan keuangan daerah yang kualitas akan dapat dipercaya oleh penggunanya dalam kaitannya dengan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

**Tabel 1.1**  
**Fenomena**

No	Kabupaten/ Kota	Opini
1	Pemprov DKI Jakarta	WDP
2	Pemerintah Kota Bandung	WDP

Fenomena yang terjadi tentang kualitas laporan keuangan yaitu yang terjadi di Pemprov DKI Jakarta untuk keempat kalinya mendapat opini wajar dengan pengecualian (WDP) dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemprov DKI Jakarta . LHP LKPD dan BPK RI atau dibacakan pada saat Rapat Paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Rabu(31/5/2017). “Berdasarkan pemeriksaan atas laporan keuangan Pemprov DKI Jakarta 2016 termasuk implementasi rencana aksi tindak lanjut oleh Pemprov DKI, maka BPK memberikan opini atas LKPD 2016 sama seperti opini tahun lalu yaitu WDP, “kata anggota BPK V RI Ismayanti, Rabu siang.

Sejumlah alasan Pemprov DKI mendapat WDP ialah terkait kontribusi yang dipungut dari pengembang proyek reklamasi tetapi tidak memiliki aturan dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) dan tidak dibahas dengan DPRD DKI Jakarta. Alasan lain ialah adanya aset yang tercatat lebih dari dua SKPD. Opini WDP telah didapatkan Pemprov DKI sejak tahun 2013, 2014, dan 2015. Gubernur non-aktif DKI Jakarta Basuki “Ahok” Tjahaja Purnama sebelumnya menargetkan tahun 2016 Pemprov DKI mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP).

( David Oliver Purba, 2017)

Kesimpulannya selama ini Pemprov DKI Jakarta selalu mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), masalah setiap tahunnya sama yaitu terkait kontribusi yang dipungut dari pengembang proyek reklamasi tetapi tidak memiliki aturan dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) dan tidak dibahas dengan DPRD DKI Jakarta dan adanya aset yang tercatat lebih dari dua SKPD.

Fenomena lain yang terjadi menyangkut kualitas laporan keuangan yaitu di Kota Bandung, Wali Kota Bandung M. Ridwan Kamil yang baru saja menerima hasil Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) mengaku menerima hasil yang sudah ditetapkan lembaga negara tersebut. Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) itu tidak membuatnya patah semangat. “ Kami sangat berterimakasih dan menerima karena proses perbaikannya juga luar biasa,”

ungkap Ridwan di Kantor Badan Pemeriksaan Keuangan Perwakilan Jawa Barat, Senin 12 Juni 2017. Salah satu faktor yang menjadi pertimbangan BPK adalah pendataan aset pemerintah yang belum tuntas. Pada pemeriksaan tahun lalu, BPK menetapkan ada sejumlah aset senilai rp 11 triliun yang harus didata ulang. Dalam kurun waktu yang hanya setahun, pemerintah kota telah menyelesaikan sekitar 85% atau senilai kurang lebih rp 9 triliun. “Tinggal sedikit lagi. Rp 2,5 triliunnya memang enggak terkejar dalam waktu setahun dengan berbagai problematika aset,” tuturnya. Ia menjelaskan, masih ada warisan masalah aset-aset yang harus dituntaskan. Ridwan Kamil menegaskan, pihaknya hanya butuh lebih banyak waktu. Namun ia optimis, tahun ini sisa pekerjaannya akan tuntas. “Karena reformasi birokrasinya kan sudah bagus semua, kecuali (WDP) ini. Kalau tahun depan berhasil, di sisa yang babak final insya aalah saya punya warisan reformasi birokrasi yang lengkap. “ujarnya.

Selain persoalan aset, faktor piutang pajak juga masih menjadi beban Pemkot Bandung. Utamanya karena ada beberapa penyewa lahan pemerintah dan penunggak pajak yang belum menuntaskan kewajibannya. “Tadi rekomendasi agar ada sinkronisasi tim. Timnya bisa memastikan tidak hanya data ada, tapi juga mereka yang berhutang itu juga memahami untuk segera menyelesaikannya hutangnya,” ucap Ridwan Kamil. Kepala kantor Perwakilan BPK Provinsi Jawa Barat Arman Syifa mengatakan, pihaknya sangat mengapresiasi upaya Pemerintah Kota Bandung untuk memperbaiki laporan keuangan tahun 2016. Pencapaian tersebut jauh lebih baik dari tahun sebelumnya. “Memang catatan kami bahwa apa yang sudah dilakukan Pemda itu jauh lebih baik daripada tahun lalu. Artinya sudah ada perkembangan dari apa



yang kami rekomendasikan tahun lalu dengan yang kami temukan tahun ini,”ucap Arman. Pada pemeriksaan kali ini, pemerintah Kota perlu memperhatikan empat faktor lagi untuk menuju opini Wajar Tanpa Pengecualian. Keempat faktor itu antara lain aset, pengadaan, piutang pajak, dan utang jangka pendek

( Arief Gunawan,2017 )

Dilihat dari fenomena yang terjadi diatas, masih banyak pihak pemerintah belum optimal dalam menghasilkan laporan keuangan yang baik ditinjau dari kualitasnya, salah satu faktornya yaitu dalam relevan, andal, dapat dipahami, dapat dibandingkan. Hal ini menyebabkan ketertarikan penulis untuk meneliti tentang kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Pada dasarnya dalam penyusunan laporan keuangan dapat dipengaruhi oleh banyak indikator penting. Hal tersebut memiliki peranan masing-masing yang saling berkaitan untuk mencapai kualitas laporan keuangan yang reliable. Beberapa indikator yang dapat mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan diantaranya, Sistem Pengendalian Internal, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Kapasitas Sumber Daya Manusia.

Kualitas laporan keuangan. Umumnya, pengendalian yang relevan dalam suatu audit adalah berkaitan dengan tujuan entitas dalam membuat laporan keuangan bagi pihak luar yang disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia (IAPI 2011). Pengendalian intern merupakan seperangkat dan prosedur untuk melindungi aset atau kekayaan dari segala bentuk tindakan penyalahgunaan, menjamin terjadinya informasi akuntansi perusahaan yang akurat. Pengendalian intern adalah suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris,

manajemen, dan personel lainnya dalam suatu entitas yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan berikut: kualitas laporan keuangan, menjaga kekayaan dan catatan organisasi kepatuhan terhadap hukum dan peraturan, efektivitas dan efisiensi operasi (Siti dan Ely, 2010:312).

Pengendalian internal meliputi organisasi yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipenuhinya kebijakan manajemen, sehingga dengan diterapkannya pengendalian internal, manajemen akan menekankan pentingnya pengendalian dan mengambil langkah penting untuk mengendalikannya. Laporan keuangan yang memiliki kualitas nilai informasi yang baik, tidak terlepas dari penerapan pengendalian internal yang baik. Penerapan sistem pengendalian internal dapat mencegah adanya suatu kegiatan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga dapat memperoleh efisiensi, efektifitas (Udiyanti, Anantawikrama, dan Darmawan, 2014).

Secara umum manfaat yang ditawarkan oleh pengguna teknologi informasi antara lain kecepatan pemrosesan transaksi dan membantu dalam penyiapan laporan. Selain itu dapat menyimpan data dalam jumlah besar, meminimalisir terjadinya kesalahan, dan biaya pemrosesan yang lebih rendah. Pemanfaatan teknologi informasi yang baik, diharapkan dapat menghasilkan pelaporan keuangan yang andal dan tepat waktu, sehingga kualitas laporan keuangan juga dapat meningkat (Widjajanto 2001 dalam Sembiring 2013). Teknologi Informasi adalah suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan,

memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu, yang digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis, dan pemerintahan serta merupakan informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan. Teknologi ini menggunakan seperangkat komputer untuk mengolah data, sistem jaringan untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer yang lainnya sesuai dengan kebutuhan, dan teknologi telekomunikasi digunakan agar data dapat disebar dan diakses secara global.

Kewajiban pemanfaatan teknologi informasi oleh pemerintah telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah. Dalam penjelasan PP No. 56 Tahun 2005 disebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah menjadi lebih efektif, tepat waktu dan andal, dan menyalurkan informasi keuangan daerah kepada pelayanan publik.

Kapasitas Sumber Daya Manusia merupakan pilar penyangga utama sekaligus penggerak roda organisasi dalam usaha mewujudkan visi dan misi serta tujuan dari organisasi tersebut. Apabila Sumber Daya Manusia yang mengelola keuangan adalah orang-orang yang memiliki kapasitas yang di dalamnya memiliki kompetensi maka dalam pengerjaan Pelaporan Keuangan Pemerintah akan memiliki Laporan Keuangan yang baik (Azhar susanto 2013). Salah satu indikator atas Laporan Keuangan yang baik adalah Kualitas dalam Pelaporan Keuangan. Kapasitas Sumber Daya Manusia ialah kemampuan yang meliputi tingkat pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang

memadai dari manusia untuk menyelesaikan tugas ataupun tanggungjawab yang diberikan kepadanya. Kapasitas sumber daya manusia dapat terlihat dari tingkat tanggung jawab yang diberikan kepadanya, yang mana tanggungjawab tersebut diuraikan didalam *job description*. Dengan *job description* yang jelas akan dapat membantu seseorang melaksanakan tugasnya dengan baik. Didalam menjalankan fungsi akuntansi diperlukan kemampuan tidak hanya mencatat transaksi dan membuat laporan keuangannya saja, tetapi juga diperlukan kemampuan dalam menentukan pilihan perlakuan akuntansi terhadap suatu transaksi, merancang, serta menganalisa sistem akuntansi yang ada.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Ni Luh Nyoman, Ari Udiyanti, Anantawikrama, Tungga Atmadja, Nyoman Ari Surya Darmawan (2014) dengan judul “Pengaruh Penerapan Satandar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Internal, dan Kompetensi Staf Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ”. Adapun perbedaan penulis dengan penelitian yang telah dilakukan oleh oleh Ni Luh Nyoman, Ari Udiyanti, Anantawikrama, Tungga Atmadja, Nyoman Ari Surya Darmawan adalah pada lokasi penelitiannya yaitu pada SKPD Kabupaten Buleleng. Hasil penelitiannya terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Internal dan Kompetensi Staf Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik melakukan penelitian mengenai sistem informasi akuntansi dan menuangkannya ke dalam laporan skripsi yang berjudul

**“Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Kapasitas Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi pada Pemerintah Kota Bandung)”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan maka permasalahan yang dapat diidentifikasi dan menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini agar dapat mencapai sasaran dalam penyusunan penulis membatasi masalah-masalah yang akan dikemukakan sebagai berikut:

1. Bagaimana Sistem Pengendalian Internal pada Pemerintah Kota Bandung.
2. Bagaimana Pemanfaatan Teknologi Informasi pada Pemerintah Kota Bandung
3. Bagaimana Kapasitas Kapasitas Sumber Daya Manusia pada Pemerintah Kota Bandung.
4. Bagaimana Kualitas Laporan Keuangan pada Pemerintah Kota Bandung.
5. Seberapa besar pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bandung.
6. Seberapa besar pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bandung.

7. Seberapa besar pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bandung.
8. Seberapa besar pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Kapasitas Sumber Daya Manusia secara bersama-sama terhadap Kualitas Laporan Keuangan di Pemerintah Kota Bandung.

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Dengan adanya rumusan masalah yang telah ditetapkan sesuai dengan penjelasan sebelumnya, maka dalam penelitian ini memiliki tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan mengetahui Sistem Pengendalian Internal pada Pemerintah Kota Bandung.
2. Untuk menganalisis dan mengetahui Pemanfaatan Teknologi Informasi pada Pemerintah Kota Bandung.
3. Untuk menganalisis dan mengetahui Kapasitas Sumber Daya Manusia pada Pemerintah Kota Bandung.
4. Untuk menganalisis dan mengetahui Kualitas Laporan Keuangan pada Pemerintah Kota Bandung.

5. Untuk menganalisis dan mengetahui seberapa besar pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan di Pemerintah Kota Bandung.
6. Untuk menganalisis dan mengetahui seberapa besar pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan di Pemerintah Kota Bandung.
7. Untuk menganalisis dan mengetahui seberapa besar pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan di Pemerintah Kota Bandung.
8. Untuk menganalisis dan mengetahui seberapa besar pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Kapasitas Sumber Daya Manusia secara bersama-sama terhadap Kualitas Laporan Keuangan di Pemerintah Kota Bandung.

#### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang dapat dipercaya dan memberikan manfaat yang berguna bagi semua pihak yang berkepentingan

##### **1.4.1 Kegunaan Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi tentang bahan informasi yang digunakan dalam hal kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota

Bandung ( PEMKOT) melalui Sistem Pengendalian Internal, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Kapasitas Sumber Daya Manusia sehingga tujuan pemerintahan dapat tercapai.

#### **1.4.2 Kegunaan Praktis**

##### **1. Bagi penulis**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan penulis dalam sistem informasi akuntansi, khususnya mengenai pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Kapasitas Sumber Daya Manusia serta meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan sebagai salah satu syarat untuk menempuh ujian Sarjana Ekonomi Program Studi Akuntansi di Fakultas Ekonomi Universitas Pasundan.

##### **2. Bagi Instansi Pemerintah**

Penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi pemerintah daerah mengenai masalah Sistem Pengendalian Internal, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Kapasitas Sumber Daya Manusia serta meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan.

##### **3. Bagi Instansi pendidikan**

Masyarakat akademik pada umumnya dan mahasiswa pada khususnya sebagai bahan referensi bagi yang melakukan penelitian lebih lanjut berkenaan dengan masalah ini.



## **1.5 Waktu dan Lokasi Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis akan melakukan penelitian di Pemerintah Kota Bandung yang beralamat di Jalan Wastukencana No. 2 Bandung. Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data yang diperlukan sesuai dengan objek yang akan diteliti, dan waktu yang diambil adalah bulan Oktober 2017 sampai dengan Februari 2018.